

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA</div>	1721 - A2
	<div>NOMOR : P3/</div> <div><input type="checkbox"/> Pembetulan Ke <input type="checkbox"/> Pembatalan</div>	<div>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</div> <div><div>0112</div></div> <div>TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN</div> <div><div>2025</div></div>

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	
A.1 NPWP : 765480199115000	A.5 NAMA JABATAN : Guru Golongan III
A.2 NIP/ NRP : 199312312023211035	
A.3 NAMA : MUHAMMAD FADLI, S.Pd	A.6 JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	A.7 NIK : 1219053112930073
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : IX / IX	A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <div>K / 00</div>

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>x</div> 21-100-01 <div></div> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	38.544.000
2.	TUNJANGAN ISTRI	3.854.400
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	3.924.000
6.	TUNJANGAN BERAS	1.738.080
7.	TUNJANGAN KHUSUS :	1.117
8.	TUNJANGAN LAIN - LAIN	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	48.061.597
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	2.403.079
11.	IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	0
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	2.403.079
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13)	45.658.518
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	45.658.518
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
23a.	PPh PASAL 21 DI POTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
24a.	PPh PASAL 21 DI POTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT	C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN	C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN	C.03 <input type="checkbox"/> BARU	C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN
---------------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------------

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK	
D.1 NPWP Instansi Pemerintah	: <div>0018088071150000</div>
D.2 Nama Instansi Pemerintah	: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA
D.3 ID Sub Unit Organisasi	: _____
D.4 Tanggal	: <div>15012026</div>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	: YUNAINI, S.Kom
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemetongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
<div></div>	<div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah</div>